

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Aditya, Purnama, *Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender: Menurut UU No. 5 tahun 1999*, Jakarta: 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary*, USA: Resived Ninth Edition, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Ctk. Pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuady, Munir Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Galuh, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Hansen, Knud, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Jakarta: Katafis, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Chandra M, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: PSHK, 2014.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ketujuh, Cet:14, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Retna K. Rachman, 2022

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 21 8/PID.SUS-TPK/2018/PN. TPG)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Hiariej, Eddy O. S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Honderich, Ted, *Punishment: The Supposed Justification, Revised edition*, Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Kagramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras: 2010.
- Kartanegara, Satochid, “*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*”, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan, 2016.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Jakarta: KPPU RI, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: KPPU RI, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: KPPU RI, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan, Perdebatan dan Isu Yang Belum Rereleasing*, Jakarta: KPPU RI, 2021.
- Knud, Hansen, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Jakarta: PT. Tema Baru, 2002.
- Kusnadi, H, *Ekonomi Mikro*, Malang: FE Unbraw, 1977.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- M, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, *Pedoman Tugas Akhir*, Jakarta: 2020.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia, Cetakan Pertama* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.
- Prasetyo, Handoyo, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi Edisi I (Revisi)*, Jakarta: UPN "Veteran", 2017.
- Prayoga, Ayudha D. et.al, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS, 2000.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Ctk. Keempat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Rasyid, Abdul Saliman, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sirait, Ningrum N, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cet. 1*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

- Sugandhi, R, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1980.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Ctk. Keempat*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam,1996.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Perkebangn Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Pers, 2007.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Armico, 1990.
- Sumardi, Tresna. P, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta: NLRP, 2010.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, cet. III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia, *Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 76, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang - Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN 1999, TLN No. 3817.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

- Indonesia, *Undang – Undang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN. 2001/ No. 134, TLN No. 4150.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004*, LN. 2004/ No. 5, TLN No. 4355.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 67, TLN No. 4401.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 153, TLN NO. 5072.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 144, TLN NO. 5063.
- Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Keppres Nomor 75 Tahun 1999.
- Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 12 Tahun 2021, LN. 2021/ No. 63.
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.
- Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (Praktik Persekongkolan Tender)*.

#### **Jurnal:**

- Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM dan Maya Shafira, *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jurnal FH Unila, volume 4 nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Ahmad, Aulia Deni *Diskriminasi dalam Pengadaan Jasa Pembuatan Logo Baru PT Pertamina (Persero)*, Jurnal Yuridika Volume 26 Nomor 1, 2011.
- Anggraini, M. Tri, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis 134 Volume 24. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005.
- Djafar, Wahyudi, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi (Oktober 2010), Vol. 7, No. 5.
- Fadhillah, Meita, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Wawasan Yuridika Volume 3, 2019.

Retna K. Rachman, 2022

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 25 8/PID.SUS-TPK/2018/PN. TPG)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Hayati, Adis Nur, *Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Jakarta: 2021.
- Munandar, M. Aris dan Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, (Februari 2021), Vol. 5, No. 1.
- Pakpahan, Normin S, “Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU tentan Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, 1999.
- Susanti, Ita dan Sri Murniati, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya*, Jurnal Sigma-Mu Vol. 10. No. 2- September 2018.
- Sirait, Ningrum Natasya, “Mencermati UU No. 5/1999 dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 Januari-Februari 2003.
- Suhardin, Yohanes, (Juli-September 2012), Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-42, No. 3.

#### **Internet:**

- Asmah, Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86>, diakses tanggal 19 Oktober 2021.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2021.
- CNN Indonesia, *KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.
- CNN Indonesia, *Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.
- Hukum Online, *Mengenali Modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60eec8afdf9a7/mengenali-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

\_\_\_\_\_, *Memahami Alur Penanganan Perkara di KPPU*,

Retna K. Rachman, 2022

*PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 26 8/PID.SUS-TPK/2018/PN. TPG)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60c80ffd0d61a/memahami-alur-penanganan-perkara-di-kppu?page=all>, diakses tanggal 21 Oktober 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Dukung Perluasan Kewenangan dan Penguatan Kelembagaan KPPU*, <https://kominfo.go.id/content/detail/37066/dukung-perluasan-kewenangan-dan-penguatan-kelembagaan-kppu/0/berita>, diakses tanggal 1 November 2021.

Kompas.com, *Selama Agustus, 10 Kontraktor Dihukum karena Persekongkolan Tender Proyek*, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/16512481/selama-agustus-10-kontraktor-dihukum-karena-persekongkolan-tender-proyek?page=all>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *KPPU Putus Perkara Persekongkolan Tender Rumah Sakit di Langsa, Provinsi Aceh*, <https://kppu.go.id/blog/2021/02/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-rumah-sakit-di-langsa-provinsi-aceh/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

\_\_\_\_\_, *PN Jakarta Pusat Kuatkan Putusan KPPU atas Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung*, <https://kppu.go.id/blog/2021/01/pn-jakarta-pusat-kuatkan-putusan-kppu-atas-persekongkolan-tender-dalam-pengadaan-sistem-penyediaan-air-minum-di-kota-bandar-lampung>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Sidharta, *Persekongkolan Tender*, <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

\_\_\_\_\_, *Penguatan Kelembagaan KPPU Dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1999*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/10/penguatan-kelembagaan-kppu-dalam-ruu-pengganti-uu-no-5-tahun-1999/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Sindo News, *Persekongkolan Tender, MA Vonis 4 Perusahaan Bayar Denda Rp.5 Miliar*, <https://nasional.sindonews.com/read/139222/13/persekongkolan-tender-ma-vonis-4-perusahaan-bayar-denda-rp5-miliar-1597925292>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.